

**TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

PROVINSI : SUMATERA UTARA

No.	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3			17	Belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%	<p>Total Belanja Dinas Sosial untuk APBD 2018, sebesar :</p> <p>Urusan Sosial : Rp. 6.304.436.901,-</p> <p>Total Belanja pelayanan dasar, sebesar Rp. 6.304.436.901,-</p> <p>Total Belanja APBD 2018, sebesar Rp. 6.304.436.901,-</p> $\frac{6.304.436.901,-}{7.026.499.637,-} \times 100 = 89,72 \%$	89,72%	Sumber data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data yang diambil merupakan realisasi keuangan (pada saat evaluasi menggunakan data laporan keuangan yang sudah diaudit).

KEPALA DINAS SOSIAL

**M.SYAH IRWAN,S.K.M.,M.Kes
PEMBINA Tk.I
NIP. 19671123 199703 1 002**

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KOTA : TEBING TINGGI
NAMA SKPD : DINAS SOSIAL
URUSAN YANG DILAKSANAKAN:
1. URUSAN SOSIAL

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						URUSAN 1	URUSAN 1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program $\frac{3}{3} \times 100 = 100 \%$	100 %	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masingmasing urusan, terlampir
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	ada sebanyak 14 SOP yang terdiri dari : 01. Administrasi Surat Masuk SOP 02. SOP Administrasi Surat Keluar 03. SOP Administrasi Pengiriman Surat Keluar 04. SOP Penerimaan Dan Penyimpanan Barang 05. SOP Pengeluaran/Penyaluran Barang 06. SOP Usul Kenaikan Pangkat 07. SOP Usul Kenaikan Gaji Berkala 08. SOP Usul Pensiun PNS/ASN 09. SOP Diklat Struktural 10. SOP Cuti PNS/ASN 11. SOP Penerbitan TASPEN 12. SOP Penerbitan Kartu Pegawai 13. SOP Kartu Istri/Suami PNS/ASN 14. SOP Pengangkatan CPNS Menjadi PNS 15. SOP Pemberian Tanda Penghormatan Satyalancana Karya Sastra X,XX,Dan XXX Tahun 16. SOP Pindah Tugas PNS Ke Luar Daerah	Ada 14 SOP	SOP yg dimaksud`adalah SOP tehnik adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						URUSAN 1	URUSAN 1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						17. SOP Pengusulan RKA 18. SOP Laporan Kinerja Tahunan 19. SOP LPPD 20. SOP RENJA 21. SOP RENSTRA 22. SOP Penerimaan Kas 23. SOP Pengeluaran Kas 24. SOP Verifikasi SPJ 25. SOP Penyusunan Laporan Keuangan 26. SOP Pemberian Bantuan Panti Asuhan 27. SOP Pemberian Bantuan Lansia 28. SOP Bantuan Hidup Minimum 29. SOP Surat Rekomendasi Pengiriman Korban NAFZA 30. SOP Penerbitan Surat Rekomendasi BPJS Kesehatan 31. SOP Bantuan Pemulangan Bagi Anak Telantar 32. SOP Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penyandang Cacat 33. SOP Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin 34. SOP Dana Sharing KUBE 35. SOP Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 36. SOP Penerimaan Dana Hibah		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	PERDA pelaksanaan sebanyak 0 PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 SPM $\frac{0}{1} \times 100 = 0 \%$	0 %	Normalisasi
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jabatan yang terisi sebanyak 11 Jabatan yang ada, sebanyak 12	91,67 %	Sumber data BKD/DUK SKPD

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						URUSAN 1	URUSAN 1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						$\frac{11}{12} \times 100 = 91,67 \%$		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	5	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS SKPD Dinas Sosial	PNS yang menangani pada Bidang Sosial sebanyak 20 personil PNS Kota Tebing Tinggi 2.854 personil	20	Sumber data BKD/SKPD. Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2018/BKD
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 8 orang. Pejabat yang ada, sebanyak 11 orang. $\frac{8}{12} \times 100 = 66,67 \%$	66,67 %	Sumber data BKD/SKPD. Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2018
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 orang Jabatan yang ada, sebanyak 11 jabatan $\frac{9}{11} \times 100 = 81,82 \%$	81,82%	Sumber data BKD/SKPD. Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2018
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 6 jenis, yang terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD 4. RKAP SKPD 5. DPA SKPD 6. DPPA SKPD	* 6 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/SKPD yang bersangkutan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						URUSAN 1	URUSAN 1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 7 program Jumlah Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 program $\frac{7}{7} \times 100 = 100 \%$	100 %	Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja-SKPD ybs.
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program Jumlah program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program $\frac{7}{7} \times 100 = 100 \%$	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2018 dan Renja-SKPD ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program Jumlah program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program $\frac{7}{7} \times 100 = 100 \%$	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2018 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2018.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						URUSAN 1	URUSAN 1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%	Total belanja SKPD, sebesar Rp. 6.304.436.901 ,- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 7.026.499.637 ,- $\frac{6.304.436.901}{7.026.499.637} \times 100 = 89,72\%$	89,72 %	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggran).
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 6.000.000,- Total Belanja SKPD, sebesar Rp6.304.436.901,- $\frac{6.000.000}{6.304.436.901} \times 100 = 0,095 \%$	0,095 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp102.555.850,- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 4.710.517.011,- $\frac{102.555.850}{4.710.517.011} \times 100 = 2,18 \%$	2,18 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (Realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp102.555.850,- Total belanja SKPD, sebesar Rp 6.304.436.901,- $\frac{102.555.850}{6.304.436.901} \times 100 = 1,62 \%$	1,62 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						URUSAN 1	URUSAN 1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Laporan keuangan SKPD *	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Operasional 3. Neraca 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Catatan Atas Laporan Keuangan	Ada	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, CaLK) * Laporan Keuangan masih dalam proses penyusunan sehingga tidak dapat dilampirkan
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	jenis dokumen : 1. Buku Inventaris 2. Laporan Mutasi Barang 3. KIR 4. KIB A, B, C, D, E, F 5. DKB 6. DKPBU	Ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 224.138.700 ,- Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp5.667.090.900 , - $\frac{224.138.700}{5.667.090.900} \times 100 = 3,95 \%$		3,95 %	Sumber data dari BPKAD
8	PEMBERIAN FASILITASI	Bentuk-bentuk fasilitas /	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	fasilitas / prasarana informasi:	1 jenis	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						URUSAN 1	URUSAN 1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	prasarana partisipasi masyarakat		1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media		1.Papan Pengumuman		yang ada (data lampirkan foto).
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	-	- ada	Survey kepuasan masyarakat/ pelanggan yang dilakukan oleh Pemda/ SKPD

Tebing Tinggi,

2019

KEPALA DINAS SOSIAL

M.SYAH IRWAN,S.K.M.,M.Kes

PEMBINA Tk.I

NIP. 19671123 199703 1 002

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KOTA : TEBING TINGGI

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN WAJIB						
22	Sosial	67	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah	3 Buah	Sumber data dari Dinas Sosial
		68	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	<p>Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun</p> <p>$\frac{1080}{2190} \times 100 \% = 49,31$</p>	49,31 %	Sumber data dari Dinas Sosial /Basis Data Terpadu (BDT)
		69	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	<p>Jumlah PMKS yg diberikan bantuan</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan</p> <p>$\frac{12.700}{12.700} \times 100 = 100 \%$</p>	100 %	Sumber data dari Dinas Sosial /Basis Data Terpadu (BDT) (Bantuan Sosial berupa Kebutuhan Pokok)

Keterangan
 *) Pilih salah satu
 **) Apabila belum tersedia, gunakan PDRB Tahun 2014

Tebing Tinggi, 2018
KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA TEBING TINGGI

M.SYAH IRWAN, SKM,M.Kes
PEMBINA Tk.I
NIP. 19671123 199703 1 002